

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberanekaragaman yang tinggi, dimana setiap daerah memiliki potensi alam, ekonomi sosial dan budaya yang berbeda-beda. Namun, potensi dan karakteristik sumber daya yang beragam itu juga yang menyebabkan tingkat pembangunan antar daerah di Indonesia menjadi berbeda-beda dan tidak merata. Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro dan Smith, 2006).

Tujuan pembangunan ekonomi pada hakekatnya ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan yang diharapkan maka diperlukan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi disparitas ekonomi. Peningkatan dan pertumbuhan perekonomian daerah akan membawa pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah yang bersangkutan (Raswita & Made, 2013).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauhmana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami

pertumbuhan apabila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada periode tertentu adalah tingkat pertumbuhan Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) riil.

Pembangunan ekonomi suatu negara dinyatakan berhasil jika terjadinya pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan berkurangnya ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pembagian pendapatan di negara-negara berkembang sejak tahun tujuh puluhan telah menjadi perhatian utama dalam menetapkan kebijaksanaan pembangunan. Perhatian ini didasarkan pada pengalaman sebelumnya, kebijaksanaan pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan semakin meningkatnya ketimpangan pembagian pendapatan dengan penelitiannya di beberapa negara.

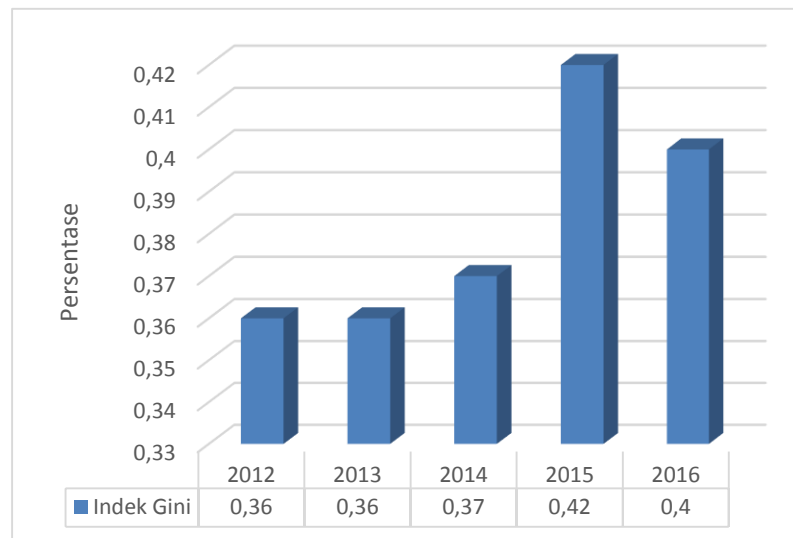
Masalah disparitas ekonomi adalah suatu ukuran atas pendapatan yang diterima oleh setiap masyarakat. Salah satu cara dalam meningkatkan distribusi pendapatan adalah dengan adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi. (Suryono,2000) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk atau suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Oleh karena itu perlu adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dan dilakukan dengan baik, sebab dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya distribusi pendapatan bagi masyarakat.

Dua masalah besar yang umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau disparitas ekonomi dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (Tambunan,2001). Hal tersebutlah yang seringkali menyebabkan beberapa daerah mencapai pertumbuhan yang signifikan, sementara beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah yang tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan karena kurangnya sumber daya yang dimiliki.

Sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, perkembangan perekonomian di Provinsi Jawa Timur tercermin dengan adanya pola kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta serta masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya yang tersedia untuk merangsang perkembangan kegiatan pembangunan ekonomi dan memperlancar pertumbuhan ekonomi dalam daerahnya yang bertujuan untuk mengurangi disparitas ekonomi di Jawa Timur. Namun pada kenyataanya, potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berada di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur memiliki keragaman dan perbedaan yang mengakibatkan timbulnya masalah disparitas ekonomi.

**Grafik 1.1**

**Indeks Gini 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur**



Sumber : BPS, 2012-2016 (Data Diolah)

Berdasarkan grafik 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan tingkat ketimpangan atau Indeks Gini di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam kurun waktu lima tahun cenderung mengalami peningkatan di setiap tahunnya terkecuali pada tahun 2016 yang mengalami penurunan. Pada tahun 2012-2013 tingkat Indeks Gini berada pada angka yang sama yaitu pada angka 0.36 persen, pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2014 nilai Indeks Gini mulai naik pada angka 0.37, dan setelahnya puncak peningkatan nilai ketimpangan terjadi di tahun 2015, dimana ketimpangan naik sebesar 0.05 persen menjadi 0.42.

Untuk tahun terakhir penelitian, di tahun 2016 tingkat ketimpangan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur menurun pada angka 0.4 persen. Meskipun penurunan ketimpangan terbilang cukup sedikit, hal ini mengindikasikan bahwa

telah ada upaya perbaikan dari pemerintah guna mengurangi tingkat disparitas ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

Salah satu faktor yang mempengaruhi adanya disparitas yang ada di Jawa Timur yaitu tidak meratanya taraf hidup masyarakat atau yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rendah atau tingginya IPM akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah IPM maka tingkat produktivitas penduduk juga akan rendah kemudian produktivitas yang rendah akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan, begitu pula sebaliknya semakin tinggi IPM maka akan semakin tinggi tingkat produktivitas penduduk yang kemudian mendorong tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi. Permasalahan yang terjadi adalah IPM pada tiap daerah itu berbeda, hal ini menjadikan IPM salah satu faktor yang berpengaruh pada ketimpangan pendapatan antar daerah/wilayah.

Peningkatan nilai ketimpangan yang signifikan ini menjadi bukti bahwa banyak anak-anak di Kabupaten/Kota di Jawa Timur terutama yang berasal dari rumah tangga miskin dan desa, tidak memperoleh awal hidup yang sama dengan anak-anak yang berasal dari keluarga yang lebih berkecukupan dan kaya. Akibatnya mereka tumbuh dengan kesehatan dan keterampilan yang kurang dibanding mereka yang mempunyai latar belakang keluarga yang baik. Faktor kedua yang menyebabkan naiknya tingkat ketimpangan ialah hanya sedikitnya tamatan sekolah yang memiliki keterampilan yang berguna untuk ekonomi modern. Sebagian besar pekerja tidak terampil terjebak dalam produktivitas rendah, gaji kecil, dan pekerjaan informal. Seiring dengan berjalannya waktu,

kesenjangan pendapatan antara pekerja terampil dan tidak terampil mengakibatkan naiknya disparitas ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

Upaya guna menekan tingkat ketimpangan di Provinsi Jawa Timur tidak luput dari dukungan pemerintah dengan mengusulkan dan membuat program-program yang bisa memperkuat perlindungan sosial, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mengurangi korupsi. Perkembangan tingkat disparitas ekonomi ini terlihat dari indikator lainnya yang ikut mempengaruhinya antara lain Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran Pemerintah, dan Jumlah Penduduk di Jawa Timur. Perbaikan tingkat ketimpangan ini dapat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih merata di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat ketimpangan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dalam skripsi dengan judul **“ Disparitas Ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya ”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi dan konsentrasi disparitas ekonomi di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2012-2016
2. Menganalisis bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap disparitas ekonomi di Jawa Timur tahun 2012-2016.

3. Menganalisis bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap disparitas ekonomi di Jawa Timur tahun 2012-2016.
4. Menganalisis bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap disparitas ekonomi di Jawa Timur tahun 2012-2016.
5. Menganalisis bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap disparitas ekonomi di Jawa Timur tahun 2012-2016.

### **C. Tujuan Masalah**

Berdasarkan urutan latar belakang masalah dan perumusan masalah, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui kondisi riil disparitas ekonomi di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016.
2. Mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap disparitas ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016.
3. Mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap disparitas ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016.
4. Mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap disparitas ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016.
5. Mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap disparitas ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis, sebagai sarana untuk latihan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh pada perkuliahan dan memperluas pengetahuan serta wawasan mengenai masalah disparitas pendapatan.
2. Bagi pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang mengarah pada proses pembangunan daerah dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
3. Bagi masyarakat, dapat digunakan untuk menambah wawasan pada bidang ekonomi, memberikan kontribusi dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Alat dan Model Analisis**

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Adapun model ekonometrika yang digunakan adalah replika dari penelitian Nobuo Akai dan Masayo Sakata (2005) yang berjudul *Fiscal Decentralization, Commitment and Regional Inequality* yang dituliskan sebagai berikut :

$$IG = f ( PE, IPM, PP, JP )$$

$$IG_t = \beta_0 + \beta_1 PE_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 \log PP_{it} + \beta_4 \log JP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

IG = Indeks Gini

PE = Pertumbuhan ekonomi



IPM = Jumlah Indeks Pembangunan Manusia  
 logPP = Jumlah Pengeluaran Pemerintah  
 logJP = Jumlah Penduduk untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t  
 $\beta_0$  = *Intercept*  
 $\beta_{1,2,3}$  = *Slope*  
 i = Menunjukkan Kota/Kabupaten  
 t = Menunjukkan waktu 2012-2016  
 $\varepsilon$  = Gabungan *error time series* dan *cross section*

## 2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang meliputi periode tahun 2012-2016 yang terdiri dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Data diperoleh dari berbagai sumber terbitan yang dipublikasikan oleh BPS dan DJPK yang meliputi variabel Indeks Gini, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penulisan ini meliputi :

### 1. BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## 2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup tinjauan umum mengenai teori yang digunakan sebagai literatur dan landasan berpikir yang sesuai topik dari penelitian ini yang dapat membantu penelitian. Dalam bab ini juga diuraikan kerangka pemikiran atas permasalahan yang diambil dan penelitian terdahulu.

## 3. BAB II : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, dan definisi operasional, metode analisis data serta estimasi model regresi dengan menggunakan panel data.

## 4. BAB IV : ANALISIS DATA dan PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian dan analisis data dan pembahasan

## 5. BAB V : PENUTUP

Bab ini menunjukkan secara singkat kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan dan dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan.